

Kajian Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Nusa Tenggara Barat



Putri Salsabila ^{1,*}, Wulandari ²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

* Corresponding author email: putsalsabila@gmail.com

ABSTRACT

Sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi daerah tahun 2025, dengan menyoroti peranannya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga ketahanan pangan. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar, masih terdapat tantangan berupa rendahnya produktivitas, keterbatasan infrastruktur, dan akses pasar. Oleh karena itu, perlu strategi pembangunan pertanian berbasis inovasi, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan penguatan kelembagaan tani untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-07-20

Revised 2025-08-20

Accepted 2025-08-25

Keywords

Sektor Pertanian,
Pembangunan
Ekonomi Daerah

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang secara geografis dan ekonomi sangat bergantung pada sektor pertanian. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung kegiatan pertanian, seperti tanah yang subur, curah hujan yang memadai di musim tertentu, serta masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian di NTB tidak hanya mencakup tanaman pangan, tetapi juga perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Dengan luas lahan pertanian yang signifikan, NTB menjadi daerah agraris yang mengandalkan sektor ini sebagai penggerak utama perekonomian daerah (BPS NTB, 2024). Sektor pertanian NTB juga berperan penting dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 25% terhadap PDRB NTB, menjadikannya sektor ekonomi terbesar setelah perdagangan dan konstruksi. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, tembakau, dan sapi potong tidak hanya dikonsumsi secara lokal, tetapi juga menjadi andalan dalam perdagangan antarwilayah, bahkan antarprovinsi. Dominasi sektor ini menunjukkan pentingnya perhatian dan pengembangan yang berkelanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi NTB (BPS NTB, 2024).

Dari segi ketenagakerjaan, pertanian menjadi lapangan kerja utama bagi masyarakat NTB. Sekitar 40% penduduk usia kerja di wilayah ini bekerja di sektor pertanian, terutama di kabupaten-kabupaten dengan basis ekonomi pedesaan seperti Lombok Timur, Dompu, dan Bima. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan sistem sosial dan budaya yang telah melekat sejak lama. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara luas (Kementan, 2023).

Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, pertanian memiliki peran strategis karena berkontribusi terhadap penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis sumber daya lokal (local-based development), yang menekankan pemanfaatan potensi domestik sebagai dasar pengembangan ekonomi daerah (Todaro & Smith, 2020). Dengan mengoptimalkan sektor pertanian, pemerintah daerah NTB dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain aspek ekonomi, sektor pertanian juga memiliki fungsi sosial dan lingkungan. Pertanian tradisional di NTB seringkali diorganisasi melalui sistem gotong royong dan kelembagaan adat yang masih kuat. Nilai-nilai ini memperkuat kohesi sosial di masyarakat pedesaan. Di sisi lain, pertanian yang berkelanjutan juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam pengelolaan sumber daya air, lahan, dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan ekologis yang melekat padanya (Syahyuti, 2021).

Namun demikian, sektor pertanian di NTB masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Masalah produktivitas yang rendah, alih fungsi lahan, minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern, serta keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing sektor ini. Selain itu, ketergantungan terhadap iklim dan kurangnya sistem irigasi yang andal juga menyebabkan ketidakpastian produksi, terutama dalam menghadapi perubahan iklim global (World Bank, 2023). Permasalahan-permasalahan ini memerlukan solusi kebijakan yang holistik dan berbasis data.

Upaya pembangunan sektor pertanian NTB juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Program-program seperti Pengembangan Kawasan Hortikultura, Lumbung Pangan Nasional, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian telah diperkenalkan untuk mendukung petani lokal. Namun efektivitas pelaksanaannya sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya kapasitas petani, dan keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan petani, swasta, dan pemerintah secara sinergis menjadi sangat penting (FAO, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis bagaimana sektor pertanian menopang pembangunan ekonomi daerah di NTB. Penulis akan mengkaji kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Selain itu, artikel ini juga menyoroti kebijakan dan strategi pengembangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan peran pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan didukung oleh studi pustaka, artikel ini menyajikan analisis komprehensif tentang relevansi sektor pertanian dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah NTB, akademisi, serta pelaku usaha dalam merancang strategi pembangunan pertanian yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sektor Pertanian

Sektor pertanian memegang peran penting dalam struktur ekonomi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, sektor ini berkontribusi tidak hanya terhadap PDRB, tetapi juga dalam hal penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan tahap awal dalam proses transformasi struktural ekonomi, di mana kelebihan tenaga kerja di pedesaan secara bertahap dapat dialihkan ke sektor industri dan jasa setelah produktivitas pertanian meningkat. Oleh karena itu, pembangunan pertanian menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ellis (2000), pertanian bukan hanya sebagai penyedia pangan dan bahan baku, tetapi juga sebagai sumber pendapatan utama bagi rumah tangga di pedesaan. Peningkatan produktivitas pertanian dapat berdampak langsung terhadap daya beli dan ketahanan pangan keluarga petani. Hal ini diperkuat oleh laporan FAO (2022), yang menyatakan bahwa pembangunan pertanian di daerah terpencil dapat mengurangi ketimpangan ekonomi regional dan memperkuat stabilitas sosial.

Pembangunan

Menurut Suryana (2000), keberhasilan suatu usaha pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari pengalaman pembangunan Negara-negara yang sekarang sudah maju,

keberhasilan pembangunan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua unsur pokok yaitu unsur ekonomi (sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal dan teknologi) dan non ekonomi (politik, sosial, budaya dan kebiasaan).

Pada umumnya pembangunan itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik dan merata, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan dengan kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan yang relatif kecil. Akan tetapi kenyataannya berbicara lain dimana pemerataan dan kesenjangan tersebut berbeda-beda (Ropingi, 2002). Tiga tujuan pembangunan yang secara universal diterima sebagai prioritas dan mutlak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia di negara-negara sedang berkembang khususnya yaitu ketahanan pangan (food security), penghapusan kemiskinan atau peningkatan kualitas hidup manusia (poverty eradication atau people livelihood improvement), dan pembangunan desa berkelanjutan (sustainable rural development). Ketiga prioritas tujuan pembangunan tersebut saling berkaitan. Ketahanan pangan saling pengaruh mempengaruhi dengan kemiskinan maupun dengan membangun desa (Simatupang, 2004).

Pembangunan Ekonomi

Menurut Suryana (2000), beberapa ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi (economic development) dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth) dengan mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP atau GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau Perkembangan GDP atau GNP yang terjadi dalam suatu Negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural). Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (developing countries) di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup (level of living) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya (Suryana, 2000).

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produksi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi atau sistem perekonomian serta sikap dari output itu sendiri (Simatupang, 2004).

Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal juga diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyesuaikan laju pertumbuhan antardaerah, antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan (Suyatno, 2000). Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Ropingi, 2002).

Proses pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dimulai dari aktivitas pemilihan komoditi dan jasa serta keahlian dan cara-cara produksi yang dimiliki oleh masyarakat setempat sebagai potensi untuk dikembangkan dan menjadi prime mover dari kegiatan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penciptaan nilai tambah mulai dari sisi bahan baku hingga sisi produknya. Pada gilirannya diharapkan bahwa

penciptaan nilai tambah tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat (Simatupang, 2004).

Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi

Kedudukan sektor pertanian dalam tatanan perekonomian nasional kembali memegang peranan cukup penting. Pada sektor perekonomian lainnya mengalami penurunan akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kondisi seperti ini memberikan kenyataan bahwa sektor pertanian masih merupakan bagian dari sumber daya pembangunan yang potensial untuk dijadikan sebagai sektor strategis perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan ditingkat regional atau daerah saat ini dan kedepan, melalui program pembangunan jangka pendek, menengah, maupun dalam program pembangunan jangka panjang (Suyatno, 2000).

Konsep dasar dari pentingnya pertanian sebagai sektor pemimpin di dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam pernyataan (Simatupang, 2004) sebagai berikut sektor andalan perekonomian adalah yang memiliki ketangguhan dan ketangguhan tinggi. Sektor andalan merupakan tulang punggung (backbone) dan mesin penggerak perekonomian (engine of growth) sehingga dapat pula disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin (leading sector) perekonomian nasional. Menurut mereka, ada lima syarat yang harus dilihat sebagai Kriteria dalam mengevaluasi pertanian sebagai sektor kunci dalam perekonomian nasional. Kelima syarat tersebut adalah strategis, tangguh, artikulatif, progresif, dan responsif.

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian (Suyatno, 2000).

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan Robinson 2004). Menurut Sirojuzilam (2008) perbedaan pokok tentang analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Setiap pembangunan daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya dengan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Syafrijal, 2008).

Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah

Sektor pertanian memang menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, namun kemiskinan absolut terbanyak juga ada di sektor pertanian, dan kemiskinan itu sendiri

merupakan hasil interaksi antara teknologi, sumber daya alam, capital, sumber daya manusia, dan kelembagaan/kebijaksanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dengan program mengangkat kemiskinan menjadi suatu prioritas, merupakan hal yang sangat tepat. (Moehar Daniel, 2004).

Secara tradisional peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi dianggap pasif dan hanya sebagai penunjang. Berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara barat, pembangunan ekonomi tampaknya memerlukan transformasi struktural ekonomi yang cepat yaitu yang semula mengutamakan kegiatan pertanian menjadi masyarakat yang lebih kompleks dimana terdapat bidang industri dan jasa yang lebih modern. Dengan demikian, peranan utama pertanian adalah menyediakan tenaga kerja dan pangan yang cukup dengan harga yang murah untuk pengembangan industri yang dinamis sebagai sektor penting dalam semua strategi pembangunan ekonomi (Todaro, 1999). Johnston dan Mellor (1961) dalam Jhingan (1990) menyebutkan bahwa peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi adalah; Sumber utama penyediaan bahan makanan, Sumber penghasilan dan pajak, Sumber penghasilan devisa yang diperlukan untuk mengimpor modal, bahan baku dan lain-lain, Pasar dalam negeri untuk menampung hasil produksi industri pengolahan dan sektor bahan pertanian lainnya.

Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian

Sektor pertanian menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat luas di negara agraris seperti halnya Indonesia serta menjadi sektor yang sangat berkontribusi dan berperan penting bagi perekonomian daerah maupun negara. Adapun potensi sektor pertanian yang dimiliki oleh daerah perlu untuk dimanfaatkan secara tepat dengan memfokuskan sektor pertanian tersebut melalui pengoptimalan komoditi unggulan daerah. Oleh karena itu, sektor pertanian sangat perlu untuk dikembangkan sebagai leading sector dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Dalam kehidupan manusia, sektor pertanian erat kaitannya dengan kebutuhan pangan yang akan selalu mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya populasi (Martauli & Astuti, 2021). Adapun sektor pertanian khususnya di Indonesia, memiliki peran yang dominan terhadap serapan tenaga kerja di samping masih banyaknya kemiskinan yang terjadi pada sektor tersebut. Namun, sektor tersebut dalam perkembangannya masih menjadi sektor utama atau andalan bagi Indonesia yang didukung adanya lahan pertanian yang masih mendominasi dan mayoritas penduduknya yang bermatapencaharian sebagai petani (Bungkuran et al., 2021).

Menurut Todaro dan Smith (2006) dalam Vaulina & Rahmi (2013), peran pertanian dalam pembangunan sekadar dianggap pasif dan hanya menjadi elemen penunjang. Oleh sebab itu, sektor pertanian di masa mendatang harus dapat menjadi sektor utama dan dipandang setara dengan sektor lainnya, seperti sektor industri (Vaulina & Rahmi, 2013). Namun, sektor pertanian saat ini dapat menjadi sektor pendukung dengan menempatkan sektor pertanian sebagai input atau penyedia barang bagi sektor lain terutama bagi sektor industri serta perdagangan dan jasa, sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang serta tantangan bagi sektor pertanian agar dapat berkembang pesat dan meningkatkan daya saing produk pertanian sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat (Muchendar et al., 2020).

Suatu proses pertumbuhan ekonomi erat berkaitan dengan perubahan baik struktural maupun sektoral, yang mana perubahan tersebut dapat berupa pergeseran dari sektor pertanian menjadi sektor non pertanian maupun dari sektor industri menjadi sektor jasa. Pergeseran sektor ekonomi pada suatu wilayah yang sedang berkembang merupakan ciri bahwa suatu wilayah sedang mengalami proses pertumbuhan ekonomi, yaitu terlihat dari adanya penurunan peran sektor pertanian dalam PDRB sedangkan peran sektor non pertanian cenderung semakin mengalami peningkatan (Bahri, 2014).

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran multidimensional dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan pendekatan yang tepat menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis pertanian dapat menjadi sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Penguatan kebijakan, peningkatan teknologi, serta pelibatan aktif masyarakat lokal menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan sektor pertanian ke depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam kontribusi, tantangan, serta strategi penguatan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pendekatan ini dipilih karena dapat mengakomodasi kompleksitas sosial, ekonomi, dan kebijakan yang melingkupi dinamika sektor pertanian di daerah tersebut (Creswell, 2014). Lokasi penelitian difokuskan pada tiga kabupaten utama di NTB yang memiliki kontribusi besar dalam sektor pertanian, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Ketiga wilayah ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik agraris yang kuat, potensi komoditas unggulan yang berbeda, serta mencerminkan keragaman konteks geografis dan sosial budaya NTB.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, seperti pejabat dinas pertanian provinsi dan kabupaten, ketua kelompok tani, penyuluh pertanian, serta pelaku usaha agribisnis lokal. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan BPS, dokumen perencanaan daerah (RPJMD), laporan Kementerian Pertanian, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan terbuka agar informan dapat menjelaskan secara mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif mereka. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang kondisi lahan, infrastruktur, dan aktivitas pertanian di lapangan.

Teknik analisis data dilakukan secara analisis isi (content analysis) dan reduksi data, dengan cara menelaah dan mengkategorikan informasi penting berdasarkan tema-tema utama: kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan ketenagakerjaan, ketahanan pangan, tantangan pembangunan, serta strategi penguatan sektor pertanian. Analisis ini dilakukan secara iteratif dan berkesinambungan hingga diperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Dan Ketenagakerjaan

Sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS NTB, 2024), sektor ini memberikan kontribusi sekitar 25% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB, menjadikannya sebagai salah satu sektor utama selain perdagangan dan konstruksi. Komoditas pertanian seperti padi, jagung, tembakau, kedelai, dan peternakan sapi potong tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi andalan ekspor antarwilayah. Dengan kontribusi yang signifikan tersebut, pertanian tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi primer daerah, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di NTB. Lebih dari 40% penduduk usia kerja di NTB bekerja di bidang pertanian, terutama di wilayah seperti Lombok Timur, Dompu, dan Bima. Tingginya ketergantungan penduduk terhadap sektor ini menunjukkan bahwa pertanian berperan langsung dalam menjaga tingkat pendapatan, mengurangi pengangguran, serta menjaga stabilitas sosial di pedesaan (BPS NTB, 2024). Ellis (2000) menyatakan bahwa sektor pertanian di negara-negara berkembang umumnya menjadi jalur utama untuk mobilisasi tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, yang sejalan dengan realitas sosial ekonomi di NTB. Komoditas jagung, misalnya, telah menjadi salah satu penopang utama ekonomi NTB. Menurut laporan Kementerian Pertanian (2023), NTB menjadi salah satu sentra produksi jagung nasional, khususnya di wilayah Dompu dan Bima. Produksi jagung yang meningkat tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang usaha hilir seperti industri pakan ternak dan pengolahan hasil. Dengan pengembangan komoditas unggulan yang berbasis kawasan, nilai tambah pertanian dapat meningkat dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Kontribusi sektor pertanian juga dapat dilihat dari peranannya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Peningkatan produksi padi dan jagung secara langsung mendukung stabilitas harga pangan dan menurunkan risiko kerawanan pangan. Hal ini sejalan dengan temuan FAO (2022) yang menekankan bahwa sektor pertanian berperan krusial dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat lokal dan nasional, terutama dalam kondisi krisis. Di NTB, pertanian terbukti menjadi penyokong utama daya tahan ekonomi saat pandemi COVID-19 melanda, ketika sektor-sektor lain mengalami penurunan tajam.

Meski demikian, kontribusi besar sektor pertanian terhadap PDRB dan ketenagakerjaan tidak serta-merta menjamin kesejahteraan petani. Produktivitas lahan yang rendah, fluktuasi harga, dan keterbatasan akses terhadap teknologi menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan potensi sektor ini. Menurut Syahyuti (2021), pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia masih tergolong lambat dibandingkan sektor lain karena belum maksimalnya penerapan inovasi dan kelembagaan yang mendukung. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui modernisasi pertanian menjadi kebutuhan mendesak bagi NTB. Lebih lanjut, pentingnya pembangunan pertanian berbasis data dan spasial juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kontribusi terhadap PDRB. World Bank (2023) menyarankan bahwa pemetaan potensi agribisnis, integrasi data petani, serta sistem informasi harga dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Di NTB, pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan ekosistem agribisnis masih dalam tahap awal dan perlu didorong lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi NTB, baik dari sisi PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Namun untuk menjaga dan meningkatkan peran strategis ini, dibutuhkan transformasi kebijakan yang menyasar peningkatan produktivitas, efisiensi distribusi, penguatan kelembagaan petani, dan pemanfaatan teknologi. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, sektor pertanian dapat berfungsi optimal sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketahanan Pangan Dan Peningkatan Kesejahteraan

Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, terutama di wilayah agraris seperti Nusa Tenggara Barat (NTB). Sektor pertanian berperan krusial dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan pokok, seperti padi dan jagung, yang menjadi konsumsi utama masyarakat. NTB dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional, dengan Kabupaten Dompu dan Bima sebagai daerah penghasil utama. Menurut laporan Kementerian Pertanian (2023), produksi jagung NTB pada tahun 2022 menembus lebih dari 1,5 juta ton, berkontribusi signifikan terhadap pasokan nasional dan stabilisasi harga pangan.

Produksi pangan yang memadai tidak hanya menekan potensi krisis pangan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika ketersediaan pangan terjaga dan harga stabil, daya beli masyarakat meningkat dan ketimpangan pangan dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan pandangan FAO (2022) yang menyatakan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai cukupnya ketersediaan pangan, tetapi juga akses ekonomi masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan aman. Dengan demikian, sektor pertanian tidak hanya menciptakan ketersediaan fisik, tetapi juga mendukung dimensi sosial dan ekonomi dari kesejahteraan masyarakat. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) menjadi salah satu inisiatif yang terbukti efektif dalam memperkuat ketahanan pangan tingkat rumah tangga di NTB. Program ini mendorong masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan mandiri. Studi oleh Susilowati (2020) menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengikuti program P2L cenderung memiliki akses pangan lebih stabil dan lebih beragam secara gizi. Selain memperkuat ketahanan pangan mikro, program ini juga meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan pertanian dan gizi keluarga.

Selain P2L, pengembangan pertanian organik dan sistem pertanian berkelanjutan juga memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan jangka panjang. Pertanian organik yang mengandalkan pupuk dan pestisida alami terbukti lebih tahan terhadap fluktuasi harga input pertanian dan lebih ramah lingkungan. Menurut Chambers dan Conway (1992), sistem

pertanian berkelanjutan tidak hanya menjamin ketersediaan pangan saat ini, tetapi juga menjaga kapasitas produksi untuk generasi mendatang. Di NTB, beberapa komunitas petani organik telah berkembang, terutama di Lombok Barat dan Lombok Utara, dan menjadi model pengelolaan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Ketahanan pangan yang kuat juga mendukung peningkatan status gizi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi, angka stunting dan malnutrisi dapat ditekan. Menurut data Bappeda NTB (2023), intervensi sektor pertanian dalam program gizi, seperti penanaman sayur-sayuran lokal dan ternak skala rumah tangga, telah membantu menurunkan prevalensi stunting di beberapa wilayah seperti Lombok Tengah dan Sumbawa. Kolaborasi lintas sektor antara dinas pertanian, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Namun demikian, tantangan dalam menjaga ketahanan pangan masih cukup kompleks. Perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan kerentanan sistem distribusi masih menjadi ancaman yang harus diantisipasi. World Bank (2023) mencatat bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada rantai pasok dan sistem logistik yang efisien. Di NTB, infrastruktur jalan dan distribusi hasil panen masih perlu diperkuat agar pangan dari daerah produksi dapat sampai dengan cepat dan murah ke konsumen, terutama pada masa paceklik atau bencana.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, jelas bahwa ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di NTB sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan sektor pertanian secara holistik. Pendekatan yang menekankan diversifikasi produksi pangan, penguatan sistem distribusi, dukungan terhadap pertanian keluarga, dan inovasi teknologi perlu terus didorong. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sektor pertanian di NTB dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri pangan, dan tahan terhadap krisis.

Tantangan Pembangunan Pertanian Di Nusa Tenggara Barat

Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi NTB, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya produktivitas lahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penggunaan teknologi modern, sarana produksi yang tidak memadai, serta lemahnya akses terhadap benih unggul dan pupuk berkualitas. Petani di NTB masih banyak yang bergantung pada praktik pertanian tradisional yang kurang efisien. Menurut Syahyuti (2021), keterbatasan akses terhadap inovasi dan teknologi menyebabkan sektor pertanian Indonesia cenderung stagnan, termasuk di NTB. Tantangan berikutnya adalah dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Fenomena cuaca ekstrem, seperti kekeringan panjang dan hujan yang tidak menentu, menyebabkan kerentanan terhadap gagal panen serta menurunnya ketersediaan air irigasi. Di NTB, beberapa wilayah seperti Dompu dan Sumbawa sering mengalami kekeringan musiman yang mengganggu jadwal tanam dan panen. Laporan World Bank (2023) menyebutkan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di wilayah timur Indonesia, termasuk NTB. Oleh karena itu, adaptasi iklim menjadi isu krusial yang harus segera ditangani.

Keterbatasan infrastruktur pertanian juga menjadi persoalan penting dalam pembangunan pertanian NTB. Jalan tani yang rusak, kurangnya gudang penyimpanan, serta irigasi yang belum merata menyebabkan tingginya biaya produksi dan distribusi. Infrastruktur yang tidak memadai menurunkan efisiensi produksi dan menyebabkan tingginya kehilangan hasil panen pascapanen. Hal ini sejalan dengan temuan dari Asian Development Bank (2021), yang menunjukkan bahwa investasi infrastruktur pertanian berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, khususnya di daerah-daerah tertinggal.

Selain aspek teknis dan lingkungan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pasok. Petani sering kali hanya menjadi penerima harga, bukan penentu harga. Ketergantungan terhadap tengkulak, minimnya akses ke pasar yang lebih luas, serta rendahnya kemampuan negosiasi menyebabkan petani tidak mendapatkan nilai jual yang layak dari hasil panennya. Menurut Uphoff (1992), ketimpangan dalam rantai nilai agribisnis harus diatasi dengan memperkuat kelembagaan petani agar

memiliki posisi tawar yang lebih kuat, seperti koperasi dan kelompok tani yang profesional. Masalah akses pembiayaan juga menjadi hambatan besar dalam pengembangan pertanian NTB. Banyak petani kesulitan mendapatkan modal usaha karena keterbatasan agunan dan minimnya literasi keuangan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian belum merata pemanfaatannya, terutama di daerah terpencil. Studi oleh Nugroho et al. (2021) menunjukkan bahwa inklusi keuangan di sektor pertanian masih rendah akibat ketidaksesuaian produk keuangan dengan siklus usaha tani. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha pertanian kecil.

Dari sisi kelembagaan, tantangan pembangunan pertanian juga berkaitan dengan rendahnya kapasitas manajerial petani dan kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh. Jumlah penyuluh pertanian yang terbatas dan rasio yang tidak sebanding dengan jumlah kelompok tani menyebabkan transfer pengetahuan dan inovasi tidak berjalan optimal. Menurut FAO (2022), peran penyuluh sangat penting dalam mendorong adopsi teknologi baru serta membangun kapasitas petani dalam manajemen usaha tani dan pemasaran. Di NTB, revitalisasi sistem penyuluhan pertanian menjadi keharusan untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian.

Tantangan-tantangan yang dihadapi sektor pertanian NTB memerlukan penanganan yang bersifat multidimensi dan kolaboratif. Pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat sipil harus bersinergi dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Intervensi kebijakan harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan kelembagaan petani, perbaikan infrastruktur, dan mitigasi risiko iklim. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, sektor pertanian NTB dapat lebih resilien dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.

Strategi Penguatan Peran Sektor Pertanian

Strategi penguatan sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus diarahkan pada pendekatan berbasis kawasan dan pengembangan komoditas unggulan. Hal ini sejalan dengan potensi geografis dan karakteristik wilayah yang berbeda-beda di NTB. Pendekatan ini memungkinkan fokus pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Sebagai contoh, jagung dapat terus dikembangkan di Dompu dan Bima, sedangkan padi dan hortikultura di Lombok Tengah dan Lombok Barat. Menurut Kementerian Pertanian (2023), pembangunan berbasis kawasan mendorong efisiensi alokasi sumber daya dan memperkuat keterkaitan antar sektor dalam sistem pertanian terpadu.

Pengembangan agroindustri menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Dengan membangun industri pengolahan hasil pertanian di dekat sentra produksi, petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk mentah, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari produk olahan. Agroindustri seperti pengolahan jagung menjadi pakan ternak, tembakau menjadi bahan baku industri, dan produk hortikultura menjadi makanan olahan dapat meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan lapangan kerja. Menurut Porter (1990), penguatan rantai nilai melalui industrialisasi lokal merupakan strategi efektif dalam meningkatkan daya saing ekonomi wilayah.

Digitalisasi pertanian juga menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan lahan, prediksi cuaca, pemasaran digital, serta sistem peringatan dini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi risiko kerugian. Inovasi seperti smart farming dan precision agriculture memungkinkan petani melakukan pengambilan keputusan berbasis data. FAO (2022) mencatat bahwa adopsi teknologi digital di sektor pertanian terbukti mampu meningkatkan hasil panen hingga 30% dan menurunkan biaya operasional hingga 20%, terutama di negara berkembang.

Peningkatan produktivitas juga membutuhkan dukungan terhadap penggunaan sarana produksi modern seperti pupuk organik, pestisida ramah lingkungan, serta benih unggul yang tahan iklim. Di NTB, penggunaan benih unggul untuk komoditas jagung dan kedelai telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun, akses terhadap input tersebut masih terbatas bagi petani kecil. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah melalui subsidi input, pelatihan teknis, dan penguatan rantai distribusi. Menurut Syahyuti (2021),

keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kemudahan akses petani terhadap sarana produksi yang tepat guna.

Strategi pemberdayaan kelembagaan tani juga menjadi fondasi penting dalam penguatan sektor pertanian. Koperasi tani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) harus diperkuat agar mampu menjadi jembatan antara petani dan akses pasar, lembaga pembiayaan, serta penyedia teknologi. Uphoff (1992) menekankan pentingnya peran kelembagaan lokal dalam meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pasok dan dalam mendorong partisipasi petani secara kolektif. Di NTB, banyak koperasi tani masih belum aktif secara ekonomi, sehingga perlu didampingi untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan akses pasar. Koordinasi antarlevel pemerintahan juga merupakan aspek kunci yang perlu diperhatikan. Kebijakan pertanian seringkali tidak sinkron antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Padahal, efektivitas program sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan teknis di lapangan. Menurut Nugroho dan Situmorang (2022), pembangunan daerah akan lebih efektif jika perencanaan dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan pemangku kepentingan lokal secara aktif, termasuk pelaku usaha dan organisasi petani.

Selain itu, perluasan akses pembiayaan bagi petani melalui perbankan dan lembaga keuangan mikro harus menjadi bagian dari strategi penguatan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian perlu diperluas cakupannya dengan skema yang lebih fleksibel dan berbasis pada karakteristik siklus usaha tani. Inovasi seperti agri-fintech juga dapat menjadi solusi inklusif untuk menjangkau petani di daerah terpencil. World Bank (2023) menyarankan pentingnya mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan konteks lokal agar pembiayaan pertanian lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Akhirnya, pendekatan pembangunan pertanian di NTB harus didasarkan pada prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Petani kecil, perempuan, dan pemuda tani harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan keberhasilan program, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan pertanian. Chambers dan Conway (1992) menyatakan bahwa pembangunan pertanian yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika masyarakat lokal menjadi subjek, bukan objek, dari pembangunan itu sendiri.

KESIMPULAN

Sektor pertanian memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Barat. Selain menjadi penyumbang utama PDRB dan penyerap tenaga kerja, sektor ini juga mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tantangan struktural dan lingkungan memerlukan upaya perbaikan yang sistematis melalui peningkatan infrastruktur, adopsi teknologi, serta penguatan kelembagaan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan petani sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pertanian Nusa Tenggara Barat yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, sektor pertanian dapat menjadi motor utama pembangunan ekonomi daerah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). *Provinsi NTB dalam Angka 2024*. Mataram: BPS NTB.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pertanian 2023*. Jakarta: BPS.
- Bangkole, F. S., Pellokila, M. R., & Tameno, N. (2024). Analisis peran sektor pertanian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional Kecamatan Kupang Barat. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 333-343.
- Bappeda Provinsi NTB. (2023). *Laporan Capaian Ketahanan Pangan dan Gizi Provinsi NTB*. Mataram: Bappeda NTB.
- Bungkuran, J., Masinambow, V. A., & Maramis, M. T. B. (2021). Analisis Peran Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(2).

- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dewi, E. Y., Yuliani, E., & Rahman, B. (2022). Analisis peran sektor pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 229-248.
- Dumairy, M.A. (2004). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Hartini, I., Malian, I., & Sholiha, E. (2023). Peranan sektor pertanian dalam perencanaan pembangunan ekonomi. *Journal of Management and Business*, 683-700.
- Jhingan, M.L. (1990). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pertanian RI. (2023). *Laporan Kinerja Pertanian Provinsi NTB*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan sektor pertanian sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian indonesia. *Transaksi*, 11(1), 80-89.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Muchendar, A., Aliudin, A., & Anggraeni, D. (2020). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Provinsi Banten. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(2), 298.
- Nugroho, H., & Situmorang, D. (2022). *Desentralisasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Puslitbang Kebijakan Pembangunan.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Ropingi, R. (2002). *Identifikasi Komponen Pertumbuhan Sektor Pertanian*. Surakarta: Pradya Paramitha.
- Saragih, J. R. (2018). *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian (Teori dan Aplikasi)* (Edisi II). Pustaka Pelajar.
- Sihombing, Y. (2021). *Peran sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah perdesaan dalam mengentaskan kemiskinan* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
- Simatupang, L. R. (2004). *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (3rd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sirojuzilam. (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa Press.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (Elfindri (ed.): Edisi I)*. Baduouse Media.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Suryana, S. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematikan dan Pendekatan*, (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Suyatno, S. (2000). *Analisis Ekonomi Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.
- Syahyuti. (2021). *Pembangunan Pertanian: Teori dan Implementasi*. Bogor: IPB Press.
- Tampun, J. S., Kapantow, G. H., Rumagit, G. A., & Sondakh, L. W. T. (2015, February). Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kota Tomohon. *In Cocos*, 6(4).
- Tarigan, Robinson. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson.
- Todaro. (1999). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Surabaya: Erlangga.
- Vaulina, S., & Rahmi, E. (2013). Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Dinamika Pertanian*, XXVIII (3), 245-254.